



ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010 - 2014

Siti Ayu Rosida¹, Fitrawansyah², Udin Saepudin³

Fakultas Bisnis dan Teknologi, Universitas Pertiwi

sitiayu.rosida@pertiwi.ac.id¹, fitrawansyahbila@gmail.com², udin.saepudin@pertiwi.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana penelitian ini akan dideskripsikan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat ketergantungan daerah, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi pada provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 – 2014. Hasil penelitian rasio tingkat kemandirian daerah menjelaskan bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Timur selama periode anggaran 2010 - 2014 sebesar 3,27%. Menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah adalah “Sangat Baik” yaitu dapat dikatakan tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Rasio ketergantungan memiliki rata – rata prosentase sebesar 1% yaitu “Sangat Rendah” yang mana Provinsi Jawa Timur sudah optimal dalam membiayai aktivitas pembangunan daerahnya, sehingga daerah tidak bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui dana perimbangan. Hasil analisis terhadap rata-rata tingkat desentralisasi fiskal Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2010 - 2014 adalah sebesar 69,34%. Tingkat efektifitas memiliki prosentase rata-rata sebesar 113,25% yaitu tingkat efektifitas “Sangat Efektif”. Rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur memiliki prosentase rata-rata sebesar 1,46% yaitu “efisien” , dimana pemerintah memberikan dana insentif untuk merealisasikan PAD dengan maksimal sehingga mampu melakukan pelaksanaan anggaran daerahnya dengan baik/efisien.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Rasio Keuangan; APBD.

Abstract

This research is descriptive in nature, in which this research will be described accordingly with the research results obtained. The purpose of this research is to find out financial performance using the level of regional financial independence, level regional dependency, level of fiscal decentralization, level of effectiveness and level efficiency in the province of East Java Fiscal Year 2010 – 2014. Research results the ratio of the level of regional independence explains that the average level of independence the regional finance of East Java Province during the 2010 - 2014 budget period amounted to 3.27%. According to the regional financial independence assessment criteria is “Very Good” that is, it can be said that they do not have a high dependency on central government through balancing funds. The dependency ratio has an average of –the average percentage is 1%, namely “Very Low” which is East Java Province has been optimal in financing its regional development activities, so that the regions does not depend on government subsidies through balancing funds. Results analysis of the average level of fiscal decentralization in East Java Province the 2010 - 2014 budget amounted to 69.34%. The level of effectiveness has a percentage an average of 113.25%, namely the effectiveness level of “Very Effective”. Efficiency ratio regional financial management in East Java Province has an average percentage of 1.46%, namely “efficient”, where the government provides incentive funds for realize PAD to the maximum so as to be able to carry out the implementation regional budget properly/efficiently.

Keywords: Financial performance; Financial Ratios; APBN

(*) Corresponding Author: Siti Ayu Rosida¹, sitiayu.rosida@pertiwi.ac.id¹

INTRODUCTION

Terjadinya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik yang cepat dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak Bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, telah membuka era baru bagi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah bertambah banyak. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Hasil nyata dari berbagai kebijaksanaan terhadap pemerintah daerah di bidang keuangan daerah dapat dilihat dari perkembangan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah (Halim, 2012 : 66).

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduknya 37.476.757 jiwa (2010). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudera Hindia (Pulau Sempu, dan Nusa Barung). Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

HEORETICAL STUDIES

1. Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengadakan kebijakan otonomi daerah adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Pemberlakuan otonomi daerah secara efektif adalah pada tanggal 1 Januari 2001. Tiga dasar sistem hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, diantaranya adalah :

- a. Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan vertikal di wilayah tertentu.

c. Tugas perbantuan, penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

2. Prinsip Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1 dalam Halim dan Damayanti, 2007).

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Yuwono (2008) jika keuangan daerah (APBD) dapat dikatakan sebagai jantung pengelolaan lembaga pemerintahan daerah, maka pengelolaan APBD merupakan denyut nadi yang merefleksikan dinamika keuangan daerah sekaligus merupakan bagian integral dari sistem keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

METHODS

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menetapkan konsep Rasio Keuangan APBD digunakan sebagai pengukur kinerja pemerintah daerah. Kinerja merupakan indikator yang dapat menentukan hasil baik buruknya keadaan sebuah pemerintah daerah serta menilai prestasi yang telah dicapai pemerintah daerah, Kinerja Keuangan Daerah diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan daerah.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab permasalahan mengenai kinerja keuangan daerah. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi menurut Halim (2001:127) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat yang membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Berikut rasio untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan daerah :

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Baik
10,01 – 20,00	Baik
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Kurang
> 50,00	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

1. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Rumus untuk menghitung rasio ketergantungan daerah adalah :

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Penerimaan Daerah Non Subsidi}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Baik
10,01 – 20,00	Baik
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

Rumus untuk menghitung tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini adalah :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

3. Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau seratus (100) persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel 4. Kriteria Penilaian Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

4. Rasio Efisiensi

Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan kemampuan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Rumus yang digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi keuangan daerah adalah :

Tabel 5. Kriteria Penilaian Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

$$\frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

RESULTS & DISCUSSION

Results

1. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah menggunakan data yang terdapat dalam tabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kemudian menghitungnya menggunakan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Dalam Rupiah)

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	DANA PERIMBANGAN	RASIO (%)	KETERANGAN
2010	5.143.999.000.000	2.214.005.000.000	2,32%	SANGAT BAIK

2011	7.615.043.000.000	2.267.158.000.000	3,33%	SANGAT BAIK
2012	9.068.160.000.000	2.408.974.000.000	3,76%	SANGAT BAIK
2013	9.523.902.000.000	2.606.703.000.000	3,65%	SANGAT BAIK
2014	11.103.565.000.000	3.459.731.000.000	3,20%	SANGAT BAIK
RATA-RATA	8.490.934.000.000	2.591.314.000.000	3,27%	SANGAT BAIK

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991),
www.djpk.depkeu.go.id, Data diolah.

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan diatas bahwa kemampuan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2010 – 2014 rata-rata adalah Sangat Baik. Diketahui bahwa pada tahun anggaran 2010 - 2014 menunjukkan prosentase tingkat kemandirian yang naik turun. Namun hal tersebut tidak mengurangi kemampuan kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola pembangunan, pemerintahan dan membiayai daerahnya sendiri. Rasio tingkat kemandirian keuangan diatas menjelaskan bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Timur selama periode anggaran 2010 - 2014 sebesar 3,27%. Menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah adalah “Sangat Baik” yaitu dapat dikatakan tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya selama tahun anggaran 2010 - 2014 serta penurunan pada tahun 2013 dan 2014, pemerintah pusat masih memberikan peningkatan dana perimbangan bagi setiap daerah. Sehingga, penerapan kebijakan otonomi daerah yang berlaku tidak serta - merta menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatann daerahnya.

2. Perhitungan Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah diukur dengan menghitung perolehan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa Subsidi (Dana Perimbangan). Total Penerimaan APBD adalah total penerimaan daerah yang diperoleh dari semua pendapatan daerah yang berasal dari masing-masing komponen pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah menggunakan data yang terdapat dalam tabel kemudian menghitungnya menggunakan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Penerimaan Daerah Non Subsidi}} \times 100\%$$

Tabel 7. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (Dalam Rupiah)

TAHUN	REALISASI PAD	PENERIMAAN NON SUBSIDI	RASIO (%)	KETERANGAN
2010	7.275.089.000.000	7.303.257.000.000	1%	SANGAT RENDAH
2011	8.898.617.000.000	8.927.814.000.000	1%	SANGAT RENDAH
2012	9.584.082.000.000	9.618.323.000.000	1%	SANGAT RENDAH
2013	11.579.341.000.000	11.976.599.000.000	1%	SANGAT RENDAH
2014	10.369.655.000.000	6.492.400.000.000	2%	SANGAT RENDAH
RATA-RATA	9.541.357.000.000	8.863.679.000.000	1%	SANGAT RENDAH

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991),
www.djpk.depkeu.go.id, Data diolah.

Tingkat Ketergantungan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1.2 tahun anggaran 2010 – 2014 memiliki rata – rata prosentase sebesar 1% yaitu “Sangat Rendah”. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan non subsidi Provinsi Jawa Timur selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya hingga tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2014 terlihat peningkatan prosentase ketergantungan menjadi 2%, hal itu disebabkan karena penurunan terhadap realisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan non subsidi. Meskipun demikian, kemampuan ketergantungan daerah Provinsi Jawa Timur terhadap PAD maupun

sumber pendapatan daerah lainnya sudah optimal dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah, sehingga daerah tidak bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui dana perimbangan.

3. Perhitungan Desentralisasi Fiskal

Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan data pendapatan asli daerah dan total penerimaan daerah yang terdapat dalam tabel dibawah ini :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Tabel 8. Rasio Desentralisasi Fiskal (Dalam Rupiah)

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TOTAL PENERIMAAN DAERAH	RASIO (%)	KETERANGAN
2010	5.143.999.000.000	7.397.414.000.000	69,57%	SANGAT BAIK
2011	7.615.043.000.000	9.907.001.000.000	76,86%	SANGAT BAIK
2012	9.068.160.000.000	11.523.017.000.000	78,69%	SANGAT BAIK
2013	9.523.902.000.000	14.996.874.000.000	63,50%	SANGAT BAIK
2014	11.103.565.000.000	17.393.778.000.000	63,83%	SANGAT BAIK
RATA-RATA	8.490.934.000.000	12.243.617.000.000	69,34%	SANGAT BAIK

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

Tingkat Desentralisasi Fiskal berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa penerimaan pendapatan asli daerah dan total penerimaan daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hasil analisis terhadap rata-rata tingkat desentralisasi fiskal Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2010 - 2014 adalah sebesar 69,34%. Dari nilai tersebut menurut kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal adalah bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah adalah “Sangat Baik”.

4. Perhitungan Rasio Efektifitas

Pengukuran tingkat efektifitas pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2010 – 2014 diketahui melalui kemampuan antara realisasi pendapatan yang diterima dengan target anggaran. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau seratus (100) persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 9. Rasio Efektifitas (Dalam Rupiah)

TAHUN	REALISASI PENDAPATA N	TARGET PENDAPATAN	RASIO (%)	KETERANGAN
2010	9.777.104.000.000	7.397.414.000.000	132,16%	SANGAT EFEKTIF
2011	11.493.376.000.000	9.907.001.000.000	116,01%	SANGAT EFEKTIF
2012	15.401.494.000.000	11.523.017.000.000	133,65%	SANGAT EFEKTIF
2013	17.411.309.000.000	14.996.874.000.000	116,09%	SANGAT EFEKTIF

2014	15.236.553.000.000	17.393.778.000.000	87,59%	CUKUP EFEKRIF
RATA-RATA	13.863.967.000.000	12.243.617.000.00	113,23%	SANGAT EFEKTIF
		0		

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, www.djpk.depkeu.go.id, Data diolah.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas selama periode tahun anggaran 2010 - 2014 Provinsi Jawa Timur memiliki prosentase rata-rata sebesar 113,25% yaitu tingkat efektivitas “Sangat Efektif”. Meskipun pada tahun 2014 realisasi pendapatan mengalami penurunan dikarenakan pertumbuhan ekonomi secara global yang mengalami penurunan serta diikuti oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semakin menurun. Namun hal itu tetap memperlihatkan rata – rata tingkat efektifitas antara target pendapatan dan

realisasi pendapatan masih cenderung “Sangat Efektif”. Pencapaian yang didapat oleh Provinsi Jawa Timur ini perlu diperhatikan dan dipertahankan.

5. Perhitungan Rasio Efisiensi

Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan kemampuan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Rumus yang digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi keuangan daerah adalah:

Tabel 10. Rasio Efisiensi (Dalam Rupiah)

$$\frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

TAHUN	PENGELUARAN BIAYA	REALISASI PENDAPATAN	RASIO (%)	KETERANGAN
2010	98.954.000.000	9.777.104.000.000	1,01%	EFESIEN
2011	138.525.000.000	11.493.376.000.000	1,20%	EFESIEN
2012	108.233.000.000	15.401.494.000.000	0,70%	CUKUP EFESIEN
2013	508.233.000.000	17.411.309.000.000	2,91%	EFESIEN
2014	162.733.000.000	15.236.553.000.000	1,06%	EFESIEN
RATA-RATA	203.336.000.000	13.863.967.000.000	1,46%	EFESIEN

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 www.djpk.depkeu.go.id, Data diolah.

Berdasarkan perhitungan tabel 1.5 rasio efisiensi dapat dilihat bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur dimana pemerintah memberikan dana insentif untuk merealisasikan PAD dengan maksimal sehingga mampu melakukan pelaksanaan anggaran daerahnya dengan baik/efisien sesuai dengan prosentase rata-rata sebesar 1,46% yaitu “efisien”. Meskipun terlihat rasio efisiensi Provinsi Jawa Timur setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Secara keseluruhan rasio efisiensi Provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata sebesar 1,46% dengan demikian menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur efisien dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya (PAD) secara maksimal.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan , rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah Provinsi Jawa Timur di era otonomi daerah berdasarkan analisis rasio keuangan adalah “Sangat Baik”. Terlihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Timur bersifat “Sangat Baik” karena memiliki rata-rata sebesar 3,27%, rasio ketergantungan prosentase rata-ratanya sebesar 1% yaitu bersifat “Sangat Rendah”, rasio desentralisasi fiskal Provinsi Jawa Timur prosentase rata-ratanya sebesar 69,34% yang bersifat “Sangat Baik”, rasio efektifitas Provinsi Jawa

Timur prosentase rata – rata sebesar 113,23% yang bersifat “Sangat Efektif” yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil atau sangat efektif. Serta rasio efisiensi Provinsi Jawa Timur prosentase rata – rata sebesar 1,46% yang bersifat “efisien” dalam memberikan biaya insentif untuk memungut PAD.

REFERENCES

- A, Oesi Agustin. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Jurnal Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Al Fahmi, Fajar Maulana. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009 – 2013. Penulisan Ilmiah Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, 2015.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan
- Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta
- D, Dita Novita A., Boki, Zulkifli., Husain, Siti Pratiwi. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo). Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.
- Halim, A. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, dkk. 2012, Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP. STIM. YKPN.
- Hendyta, Amanda Rizka. Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009-2013. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.
- Hidayat. S. 2008. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State- Society Relation. Jurnal Politik, Vol. 1. Universitas Nasional. Jakarta .
- Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
- Kota Malang.
- Landiyanto. E. A, 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. Jurnal Akuntansi. Universitas Erlangga. Surabaya. Vol. 1.
- Mamesah. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.

Pamudji, Kaho, dan Yosef Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Pauwah, Sudirman., Saerang I., Mandey, S. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada PEMDA Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Magister Manajemen Universitas Simratulangi, Manado. ISSN 2303-1174, *Jurnal EMBA*, Vol. 2 No. 3 September 2014, Hal. 001-012.

UPPAMP YKPN, Yogyakarta.

Wahyuni, Nanik. 2012. Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah.

, UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.

_____, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

_____, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

_____, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

_____, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

_____, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.